

Judul : ASN Pindah Ke IKN Siapkan Juga Semua Infrastruktur Dasar
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

ASN Pindah Ke IKN Siapkan Juga Semua Infrastruktur Dasar



Aria Bima

WAKIL Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyoroti proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masalah ini dinilai bukan sekadar persoalan logistik, melainkan menyangkut aspek kemanusiaan. Karena itu, prosesnya harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

Dia mengingatkan, perpindahan ASN ke IKN jangan dipandang hanya sebagai pemindahan pegawai, tetapi juga pemindahan kehidupan manusia dengan seluruh kebutuhan dasarnya. Sebelum proses dimulai, seluruh prasyarat kemanusiaan harus dipenuhi terlebih dahulu, mulai dari ketersediaan rumah sakit, perumahan, sekolah, hingga fasilitas dasar lainnya.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur fisik harus sejalan dengan perencanaan sosial yang matang. Sebab, pemindahan ASN bukan hanya soal memindahkan tempat kerja, tetapi juga menyangkut penyesuaian psikologis, kehidupan sosial, hingga urusan

domestik yang tak bisa diabaikan.

"Misalnya, jika suami-istri sama-sama ASN, apakah keduanya harus pindah, atau salah satunya tetap di Jakarta? Ini harus dibahas dengan cermat," ujar anggota Fraksi PDIP itu dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Dia bilang, penjadwalan pemindahan ASN perlu diatur secara lebih terencana oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Langkah tersebut penting agar aktivitas pemerintahan di IKN dapat segera berjalan efektif dan terkoordinasi.

"Tidak mungkin IKN dibiarkan kosong seperti sekarang. Kalau tidak segera dimanfaatkan, saya khawatir kesannya akan seperti proyek mangkrak," tegasnya.

Aria menambahkan, Komisi II juga tengah menyiapkan rencana dan peta jalan (roadmap) pembangunan gedung legislatif dan yudikatif yang akan didanai melalui anggaran tahun 2026.

"Kami ingin memastikan pembangunan IKN berjalan beriringan antara infrastruktur, kelembagaan dan kemanusiaan," ucapnya.

Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal percepatan pembangunan IKN melalui fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran negara.

Komisi II telah menelaah dan menyetujui alokasi anggaran bagi Otorita IKN untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tahap pertama. ■ PYB